

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

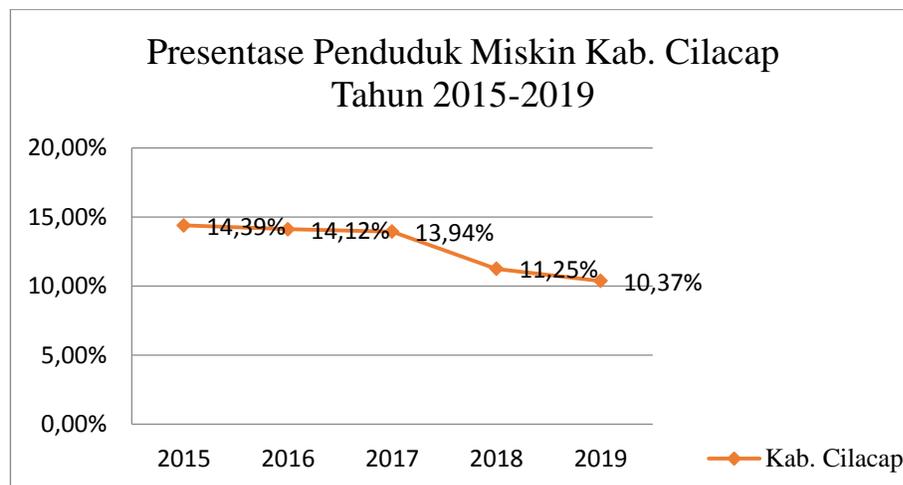
Kondisi ekonomi Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang baik setelah melewati krisis ekonomi terbesar pada tahun 1998. Krisis yang bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah itu kemudian merontokkan pembangunan ekonomi yang telah dicapai. Setelah lebih dari satu dasawarsa pemulihan ekonomi dari krisis, kini kondisi perekonomian telah bangkit menuju kemajuan. Tantangan pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati secara merata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam distribusi (Parimin dan Umar, 2018).

Indonesia termasuk dalam negara berkembang, alasan Indonesia masih menyanggah status negara berkembang ini karena pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih termasuk kategori menengah ke bawah sehingga masyarakatnya terbilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Kesejahteraan akan berhubungan dengan adanya kemiskinan dan sebuah pertumbuhan yang sangat tinggi dalam pembangunan ekonomi, namun akan dilihat sejahtera apabila suatu indikator yang dalam segi pembangunan dan ekonomi mulai meningkat dengan semestinya sehingga indikatornya

mencapai keberhasilan akan tercapainya akumulasi kapital dan pendapatan perkapita, paradigma ini akan sejahtera apabila masyarakatnya atau seluruh aktivitasnya berlandaskan syariah atau hukum-hukum islam (Purnawa, 2014).

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan miskin. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, pada Tahun 2019 persentase jumlah penduduk miskin turun menjadi 10,37 % atau 185.182 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan. Meskipun dari tahun ke tahun angka kemiskinan Kabupaten Cilacap mengalami penurunan, akan tetapi tidak terlalu signifikan.

Tabel 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Cilacap 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang tidak menentu dan dari data terakhir di BPS ( Badan Pusat Statistik) untuk tahun 2019 kemiskinan di cilacap mengalami penurunan sekitar 1 persen.

Kecamatan Kroya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk sebanyak 8,568 warga yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan buruh tani.

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik dan sampai saat ini belum ada solusi yang riil dalam menuntaskannya baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dan bahkan sering kali hanya dijadikan sebagai objek dalam proses pembangunan. Belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut, mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan relatif di tentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang di tetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif amat erat kaitanya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010)

Pendapatan masyarakat sebagaimana pemikiran Rosyidi (2006) adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer. Menurut Sumondiningrat (1999) dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera dibutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan yang pada hakekatnya berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan manusia

dengan mengikutsertakan segala lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, disamping itu pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu proses yang muncul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk dinikmati oleh masyarakat secara berkesinambungan.

Menurut Sulhan dan Ely (2008) Perkembangan perekonomian membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negarapun yang tidak memanfaatkan lembaga tersebut. Semakin baik kondisi keuangan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dirumuskan model atau sistem keuangan yang sesuai dengan dengan kondisi riil para pelaku usaha skala mikro kecil maupun skala rumah tangga yang sesuai dengan sistem *syariah* sehingga dapat menjangkau masyarakat atau kelompok usaha lapisan bawah. Akhir-akhir ini lembaga keuangan mikro berbasis syariah mulai menyebar di Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Cilacap. Salah satu alternatif yakni melalui *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Baitul maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil diseluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada saat ini.

BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT memiliki dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tanwil. BMT sebagai baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahik) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS dan wakaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan BMT (Ridwan, 2006). Sedangkan BMT sebagai baitul tanwil adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat (anggota) dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat (anggota) yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari anggota, melalui investasi atau tabungan, kegiatan Baitul Tanwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil. Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis karena BMT bukan bank syariah. BMT lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan yang hakiki antara BMT dengan nasabah. Inilah landasan filosofis BMT yang menjadi pedoman operasional.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dan berbadan hukum koperasi, yang tidak hanya berorientasi bisnis akan tetapi juga berorientasi sosial. Di samping itu BMT juga menjadi alternatif penyedia jasa keuangan dan pendekatan terbaik untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan umat di mana BMT itu berada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut BMT memainkan peran dan fungsinya seperti yang dikemukakan oleh Ridwan, et.al. (2004) dalam Ismail (2009: 104) yakni :

Pertama, Mengidentifikasi, mengorganisasi, memobilisasi, mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. Kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Ketiga, Menggalang serta memobilisasi potensi masyarakat atau anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Keempat, Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan mudharib terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sadaqah, wakaf, hibah dan lainnya. Kelima, Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemilik modal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Dengan peran dan fungsi tersebut di atas BMT diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sriyana dan Fitri Raya pada tahun 2013 yaitu menganalisis peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, khususnya dari aspek peran BMT dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. Metode analisis menggunakan analisis regresi dengan data-data persepsi dari anggota. Berdasarkan hasil analisis, variabel edukasi usaha, pemanfaatan dana baitul maal, dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki peran yang signifikan pada peningkatan pendapatan anggota. Untuk meningkatkan efektivitas peran BMT di Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan melalui edukasi, pemanfaatan baitul maal dan peningkatan motivasi kerja anggota.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Ben Sejahtera karena merupakan salah satu BMT yang sudah memiliki 6 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas yang berkantor pusat di kecamatan Kroya, Cilacap. Keberadaan BMT ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat termasuk dalam kategori menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan buruh. Sehingga banyak masyarakat sekitar yang melakukan pembiayaan ataupun mendapatkan bantuan dari BMT secara langsung. BMT tersebut memiliki program kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu BMT yang memiliki program pengentasan kemiskinan yaitu dengan program pemberian

bantuan berupa bedah rumah, pengoptimalan zakat, infak dan sedekah di daerah Kabupaten Cilacap khususnya di desa Kroya dan sekitarnya serta program kerja yang di lakukan oleh pihak BMT antara lain mempunyai desa binaan dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang berada di sekitar BMT.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap maka penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil judul “Peran KSPPS BMT Ben Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana peran KSPPS BMT Ben Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan anggota?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan pada rumusan masalah yang digunakan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

Untuk mengetahui bagaimana peran KSPPS BMT Ben Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan anggota.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang keilmuan tentang lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan peran KSPPS BMT Ben Sejahtera Cilacap dalam meningkatkan pendapatan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi lebih lanjut dengan kajian yang lebih luas dalam melakukan penelitian selanjutnya.